



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWASAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
www.bawas.mahkamahagung.go.id, informasi.bawas@mahkamahagung.go.id

PENGUMUMAN
Nomor 2284/BP/PW1.1.1/VI/2025

TENTANG

HASIL SELEKSI ADMINISTRASI
EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
(WBK) SECARA MANDIRI TAHUN 2025

Sehubungan dengan Pelaksanaan evaluasi Zona Integritas Menuju WBK secara Mandiri, dengan ini Tim Penilai Internal (TPI) Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) menyampaikan hal-hal berikut:

1. Seleksi administrasi terhadap satuan kerja usulan Zona Integritas Menuju WBK secara mandiri dilaksanakan pada 16 s.d. 20 Juni 2025, berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 4440/SEK/OT1/V/2025 tanggal 27 Mei 2025 kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), dan hasilnya ditetapkan dalam Rapat Pleno Tim Penilai Internal pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025;
2. Seleksi administrasi mengacu pada ketentuan berikut:
 - a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM di Instansi Pemerintah jo Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM di Instansi Pemerintah;
 - b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 194 Tahun 2025 tentang Instansi Pemerintah Pelaksana Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Secara Mandiri Tahun 2025;
 - c. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2025 tentang Teknis Pengusulan Unit Kerja/Satuan Kerja menuju WBK/ WBBM dan Pelaksanaan Survei Mandiri ZI Tahun 2025;



3. Hasil seleksi administrasi sebagaimana tercantum pada **Lampiran I** terbagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu: **Lulus** dan **Tidak Lulus**;
4. Unit Kerja yang dinyatakan **Lulus** akan dilanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu evaluasi **Analisis Dokumen**;
5. Unit kerja yang dinyatakan **Tidak Lulus**, tidak dapat melanjutkan evaluasi ke tahap berikutnya. Namun, apabila terdapat keberatan atas hasil seleksi, unit kerja dapat mengajukan **sanggahan** sesuai ketentuan pada **Lampiran II** dan **Lampiran III**;
6. TPI dapat menerima atau menolak sanggahan berdasarkan hasil verifikasi terhadap bukti sanggah yang diajukan oleh satuan kerja;
7. Pengumuman hasil sanggahan akan disampaikan pada tanggal 26 Juni 2025.

Demikian pengumuman ini disampaikan. Apabila diperlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdri. Ines (0878-8299-6605) atau Sdr. Arief (0856-4211-1177).

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada 23 Juni 2025

Plt. Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI,
Ditandatangani secara elektronik



Sugiyanto



LAMPIRAN I
Pengumuman Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI
Nomor : 2284/BP/PW1.1.1/VI/2025
Tanggal : 23 Juni 2025

HASIL SELEKSI ADMINISTRASI

I. UNIT KERJA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI ADMINISTRASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK

1. Lingkungan Eselon I

No	Nama Unit Kerja
1	Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

2. Lingkungan Peradilan Umum

2.a. Tingkat Banding

No	Nama Unit Kerja
1	Pengadilan Tinggi Bengkulu
2	Pengadilan Tinggi Banda Aceh
3	Pengadilan Tinggi Makassar

2.b. Tingkat Pertama

No	Nama Unit Kerja
1	Pengadilan Negeri Balikpapan
2	Pengadilan Negeri Bangil
3	Pengadilan Negeri Bangli
4	Pengadilan Negeri Banjarbaru
5	Pengadilan Negeri Banjarmasin
6	Pengadilan Negeri Bengkulu
7	Pengadilan Negeri Blora
8	Pengadilan Negeri Boyolali
9	Pengadilan Negeri Bulukumba
10	Pengadilan Negeri Cianjur
11	Pengadilan Negeri Jantho
12	Pengadilan Negeri Kuala Kurun
13	Pengadilan Negeri Kudus
14	Pengadilan Negeri Lhoksukon
15	Pengadilan Negeri Lubuk Basung
16	Pengadilan Negeri Karawang
17	Pengadilan Negeri Marabahan
18	Pengadilan Negeri Ngabang
19	Pengadilan Negeri Bojonegoro
20	Pengadilan Negeri Pekalongan
21	Pengadilan Negeri Pelalawan
22	Pengadilan Negeri Purbalingga
23	Pengadilan Negeri Purwakarta
24	Pengadilan Negeri Purwokerto
25	Pengadilan Negeri Rembang
26	Pengadilan Negeri Rokan Hilir



No	Nama Unit Kerja
27	Pengadilan Negeri Sekayu
28	Pengadilan Negeri Semarang
29	Pengadilan Negeri Serang
30	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura
31	Pengadilan Negeri Simalungun
32	Pengadilan Negeri Sinabang
33	Pengadilan Negeri Sukabumi
34	Pengadilan Negeri Sumbawa Besar
35	Pengadilan Negeri Tabanan
36	Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
37	Pengadilan Negeri Tembilahan
38	Pengadilan Negeri Unaaha

3. Lingkungan Peradilan Agama

3.a. Tingkat Banding

No	Nama Unit Kerja
1	Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung
2	Pengadilan Tinggi Agama Banten
3	Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara

3.b. Tingkat Pertama

No	Nama Unit Kerja
1	Pengadilan Agama Gresik
2	Pengadilan Agama Samarinda
3	Pengadilan Agama Bungku
4	Pengadilan Agama Temanggung
5	Pengadilan Agama Lubuk Basung
6	Pengadilan Agama Soe
7	Pengadilan Agama Binjai
8	Pengadilan Agama Slawi
9	Pengadilan Agama Tegal
10	Pengadilan Agama Denpasar
11	Pengadilan Agama Bengkulu
12	Pengadilan Agama Payakumbuh
13	Pengadilan Agama Sibolga
14	Pengadilan Agama Dataran Hunimoa
15	Pengadilan Agama Bontang
16	Pengadilan Agama Bengkayang
17	Pengadilan Agama Pamekasan
18	Pengadilan Agama Polewali
19	Pengadilan Agama Bangko
20	Pengadilan Agama Kendari
21	Pengadilan Agama Manokwari
22	Pengadilan Agama Amuntai
23	Pengadilan Agama Bengkalis
24	Pengadilan Agama Sukamara
25	Pengadilan Agama Sidoarjo
26	Pengadilan Agama Pringsewu
27	Pengadilan Agama Limboto
28	Pengadilan Agama Tarempa



No	Nama Unit Kerja
29	Pengadilan Agama Wates
30	Pengadilan Agama Tutuyan
31	Pengadilan Agama Lubuk Linggau
32	Pengadilan Agama Rantau
33	Pengadilan Agama Ngamprah
34	Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong
35	Pengadilan Agama Cibinong
36	Pengadilan Agama Mataram
37	Pengadilan Agama Depok
38	Pengadilan Agama Sei Rampah
39	Pengadilan Agama Arso
40	Pengadilan Agama Enrekang

4. Lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

4.a. Peradilan Militer

No	Nama Unit Kerja
1	Pengadilan Militer III-15 Kupang

4.b. Peradilan Tata Usaha Negara

4.b.1. Tingkat Banding

No	Nama Unit Kerja
1	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

4.b.2. Tingkat Pertama

No	Nama Unit Kerja
1	Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
2	Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang
3	Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin

II. UNIT KERJA YANG DINYATAKAN **TIDAK LULUS SELEKSI** ADMINISTRASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK

1. Lingkungan Peradilan Umum

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
1	Pengadilan Negeri Batang	1. Area pengungkit pada Penataan Tata Laksana poin ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) huruf d, evidennya tidak dapat dibuka. 2. Laporan SPAK dan SPKP sudah dilengkapi dengan nama responden dan no. telp serta tanggal survei masing-masing responden yang diambil/sceenshoot dari aplikasi sisuper namun tidak jelas/kabur 3. Area Pengungkit 1 Tidak Lulus (Tidak Memenuhi Syarat dengan nilai 46,43 dari 60)
2	Pengadilan Negeri Nganjuk	Belum melampirkan data tabulasi dan kontak responden pada Laporan Hasil Survei
3	Pengadilan Negeri Cilacap	Jenis layanan tidak dimuat di laporan hasil survei dan metode survei masih menyebut IPAK
4	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	1. Tidak ada catatan pada Kolom Catatan/Keterangan/Penjelasan atas Jawaban Unit



No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
		2. Beberapa data dukung tidak tersedia link-nya; 3. Tidak tersedia unggahan Laporan Hasil Survei
5	Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun	1. Jenis layanan tidak dimuat di laporan hasil survei. 2. Data kontak responden tidak disampaikan di laporan hasil survei.
6	Pengadilan Negeri Namlea	Area Pengungkit 1, 2 dan 6 Tidak memenuhi nilai minimal kelulusan.
7	Pengadilan Negeri Nunukan	Pada LKE tidak ada kolom penilaian dan Catatan TPI
8	Pengadilan Negeri Tanjung Balai	1. Sebagian link LKE tidak bisa diakses. 2. Tidak ada lembar pengesahan survei, data survei (Bab IV) tidak terbaca
9	Pengadilan Negeri Tanjung Pandan	1. Sebagian link LKE tidak bisa diakses. 2. Survei SPKP di luar pekan survei (1 Oktober 2024 s/d 31 Desember 2024) baik pada LKE maupun pada Folder Hasil Survei.

2. Lingkungan Peradilan Agama

No	Nama Unit Kerja	Catatan Evaluator
1	Pengadilan Agama Maumere	Pada LKE tidak ada kolom penilaian TPI

Plt. Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI,
Ditandatangani secara elektronik



Sugiyanto



LAMPIRAN II
Pengumuman Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI
Nomor : 2284/BP/PW1.1.1/VI/2025
Tanggal : 23 Juni 2025

TEKNIS TINDAK LANJUT HASIL SELEKSI ADMINISTRASI
UNTUK UNIT KERJA YANG TIDAK LULUS

No	Hasil Evaluasi	Tindak Lanjut	Waktu
1	Tidak Lulus	Surat sanggahan setidaknya memuat nama unit kerja, alasan sanggah, dan bukti dukung yang valid (contoh surat sanggah ada pada Lampiran III) melalui tautan: https://bit.ly/SanggahWBK2025	Paling Lambat pada 25 Juni 2025

Plt. Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI,
Ditandatangani secara elektronik



Sugiyanto



LAMPIRAN III
Pengumuman Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI
Nomor : 2284/BP/PW1.1.1/VI/2025
Tanggal : 23 Juni 2025

CONTOH SURAT SANGGAH

Nomor : (Nomor Surat) (Tanggal Surat)
Lampiran : (Sejumlah berkas yang disampaikan)
Hal : Pengajuan Sanggah atas Hasil Seleksi Administrasi
Zona Integritas Tahun 2025

Yth.
Koordinator Tim Penilai Internal
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Di
Jakarta

Sehubungan dengan Pelaksanaan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara Mandiri, kami telah menerima pengumuman Nomor .../BP/PW1.1.1/6/2025 mengenai Hasil Seleksi Administrasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara Mandiri Tahun 2025. Berdasarkan pengumuman tersebut, kami sampaikan untuk unit kerja yang dinyatakan TIDAK LULUS sebagai berikut:

Nama Unit Kerja	Keterangan TIDAK LULUS	Alasan Sanggah

Demikian kami sampaikan surat sanggahan ini dengan sebenarnya. **Bukti dukung** dari sanggah tersebut kami sampaikan di dalam lampiran surat ini. Kami mohon agar Tim Penilai Internal dapat melakukan evaluasi atas unit kerja tersebut.
Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta,.... Juni 2025
Pimpinan Unit Kerja
Ttd.
Nama
NIP

Plt. Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI,
Ditandatangani secara elektronik

Sugiyanto

